

BAB III

PEMBENTUKAN *JAPAN – SWITZERLAND FREE TRADE AND ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (JSFTEPA)*

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bagaimana sejarah perekonomian Jepang dan Swiss serta sejarah kerjasama antara kedua negara. Kemudian dalam bab ini akan membahas bagaimana pandangan kedua negara terhadap *Free Trade Agreement* serta pembahasan tentang pembentukan *Japan – Switzerland Free Trade and Economic Partnership Agreement*. Bab ini akan dibagi menjadi empat sub-bab, sub – bab pertama akan membahas tentang perdagangan bebas atau *Free Trade*, kemudian sub-bab kedua akan membahas tentang perspektif dan kebijakan perdagangan bebas Jepang, di sub-bab ketiga akan membahas tentang perspektif dan kebijakan perdagangan bebas Jepang, dan di sub-bab terakhir pembahasan akan menjelaskan tentang proses negosiasi dan pembentukan *Japan – Switzerland Free Trade and Economic Partnership Agreement* yang dinegosiasikan pada tahun 2007 dan diberlakukan pada tahun 2009.

A. Perdagangan Bebas

Dalam lingkup ekonomi internasional, hubungan kerjasama antara negara seringkali dihadapkan dengan sistem internasional yang anarki. Sistem ini kerap kali menjadi sesuatu yang kompleks meskipun berada dalam rezim internasional. Perkembangan ekonomi internasional menjadi hal yang sangat signifikan bagi pembentukan kesejahteraan suatu negara, sehingga isu ekonomi menjadi sesuatu

yang sangat vital dan perlu untuk ditangani. Untuk menangani isu - isu yang ada setiap negara akan melakukan metode yang berbeda satu sama lain. Resolusi tiap negara akan dipengaruhi oleh keadaan internal suatu negara, faktor – faktor seperti keadaan dari industri serta sektor-sektor ekonomi nasional akan menjadi tolak ukur bagi pembentukan resolusi. Hal ini merupakan dampak dari kenyataan bahwa ekonomi nasional akan berkembang kearah ekonomi internasional menyangkut faktor – faktor seperti produksi, perdagangan, sumber daya, finansial, dan juga faktor lainnya.

Dalam hubungan perdagangan antar negara, perlindungan industri domestik melalui ketentuan perdagangan (*Term of Trade*), proteksi, tarif pajak, dan kuota, yang telah menjadi cara konvensional suatu negara melindungi industri domestiknya terhadap barang-barang impor yang harganya lebih murah. Permasalahan politik ekonomi internasional adalah ketidak seimbangan antara sistem negara yang memiliki teritorial (*Nation-state*) dengan sistem internasional yang berkembang dan meningkat secara non-teritorial dan globalisasi (Rudi, 2003). Bentuk proteksi yang dilakukan suatu negara terhadap produk – produk ekonomi kerap kali berdampak terhadap stagnansi perkembangan ekonomi. Arus globalisasi ekonomi yang kian tak terbendung menjadikan kebijakan perlindungan perdagangan dalam bentuk proteksi dan tarif pajak bukanlah resolusi yang tepat dalam menangani isu ekonomi yang ada. Bahkan kebijakan ini kerap kali berdampak pada penurunan angka perdagangan, hal tersebut terjadi karena jika suatu negara melakukan proteksi terhadap suatu produk negara lain, maka negara yang melakukan ekspor tersebut cenderung melakukan proteksi terhadap produk –

produk dari negara yang sebelumnya melakukan perlindungan perdagangan. Reaksi timbal balik ini cenderung dilakukan sebagai upaya menjaga keseimbangan neraca perdagangan suatu negara.

Globalisasi perekonomian merupakan interaksi antar negara diseluruh dunia yang menjadikan kekuatan ekonomi yang semakin ter-integrasi dengan proses kegiatan ekonomi dan perdagangan tanpa adanya hambatan teritorial negara. Sistem globalisasi perekonomian mengharuskan suatu negara melakukan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus perdagangan antar negara baik dalam hal modal, barang maupun jasa (Ihsan, 2015). Globalisasi ekonomi kerap kali dikaitkan dengan paham liberalisasi perdagangan, dan saat ini banyak negara yang menerapkan paham ini dengan maksud meng-ekspansi segala peluang-peluang pasar yang ada. Adanya globalisasi dalam sektor ekonomi akan membuka kesempatan bagi produk – produk domestik untuk memperluas pasar ke lingkup internasional dan sebaliknya hal ini juga membuka peluang masuknya produk global ke dalam pasar domestik. Hal ini akan berdampak terhadap terciptanya kompetisi antara produk – produk yang berada dalam pasar, baik produk domestik maupun produk global. Adanya kompetisi antara produk - produk ini akan mendorong produsen-produsen dari berbagai negara untuk melakukan pengembangan produk mereka, baik dalam hal inovasi, kualitas produk serta harga. Hal ini merupakan sesuatu yang tak terhindarkan, karena produsen - produsen tersebut akan berusaha untuk mempertahankan posisi mereka serta bertahan dalam persaingan yang ada. Ketika hal ini terjadi, maka batas -batas suatu negara seakan menghilang, peristiwa ini akan mendorong terjadinya liberalisasi

ekonomi yang akan menguatkan interaksi antara sektor ekonomi domestik dengan ekonomi internasional tanpa memperdulikan batasan – batasan yang ada.

Adam Smith yang disebut sebagai bapak liberalisasi ekonomi menyatakan bahwa pasar akan cenderung meluas secara spontan demi kepuasan kebutuhan manusia tanpa adanya campur tangan pemerintah (Sorensen, 2013). Adam Smith juga percaya bahwa aktor individu yang rasional percaya terhadap kemajuan dan asumsi keuntungan timbal balik. Serta menambahkan tentang ekonomi pasar yang merupakan sumber utama kemajuan, kerjasama, dan kesejahteraan. Sebaliknya campur tangan dari pemerintah akan mengakibatkan tidak ekonomis, kemunduran, dan menyebabkan konflik (Sorensen, 2013).

Paham liberal kerap dikatakan sebagai doktrin dan rangkaian prinsip yang bertujuan untuk mengatur dan melakukan kordinasi pertumbuhan ekonomi. Dimana paham ini mencoba untuk meningkatkan perekonomian suatu negara serta kesejahteraan individu. Dasar pemikiran ekonomi liberal adalah pembebasan aktivitas ekonomi bagi tiap – tiap individu tanpa adanya intervensi pemerintah. Paham ini percaya dengan adanya pembebasan maka keteraturan pasar serta arus perdagangan akan tercipta dengan sendirinya, kepercayaan ini dikenal dengan istilah “*The Invisible Hand*”. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kegiatan ekonomi tidak dapat terlepas dari pengaruh sektor pemerintahan. Pemerintahan perlu melakukan negosiasi dengan pemerintahan lainnya dengan maksud mempermudah arus perpindahan modal, barang maupun jasa antar negara. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa pemerintah perlu melakukan serangkaian negosiasi dengan pemerintah lain dalam menentukan arah kebijakan serta koordniasi regulasi

untuk meningkatkan arus perdagangan, dalam hal ini salah satu contohnya adalah perjanjian *Free Trade Agreement* (FTA).

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, FTA merupakan suatu perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan antara suatu negara dengan negara lainnya. Pembentukan berbagai FTA merupakan akibat dari liberalisasi perdagangan yang tidak dapat dihindari oleh semua negara sebagai anggota masyarakat internasional. Hal inilah yang mendorong terbentuknya blok-blok perdagangan bebas. FTA dapat dibentuk secara bilateral, misalnya antara Amerika Serikat dengan Singapura, Amerika Serikat dengan Chili; Japan dengan Singapura; maupun regional seperti *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), *North America Free Trade Area* (NAFTA) dan Uni Eropa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013)

Pendapat lain menurut Arthur O'Sullivan dan Steven M. Sheffrin dalam bukunya yang berjudul *Economics : Principles in Action* menyatakan bahwa *Free Trade Agreement* adalah perjanjian menyangkut kerjasama antara dua negara atau lebih untuk mengurangi hambatan perdagangan (seperti kuota impor dan tarif) dan untuk meningkatkan perdagangan barang dan jasa antar negara satu dengan negara lainnya yang terlibat perjanjian (O'Sullivan & Sheffrin, 2003)

Ketidak pastian dalam arus globalisasi ekonomi kerap kali menuntut pemerintah untuk turut berperan di pasar global. Campur tangan pemerintah dalam bentuk manajemen ekonomi politik merupakan faktor yang sangat menentukan nasib perekonomian nasional dalam perekonomian global. Keputusan suatu negara untuk bergabung dengan organisasi internasional yang terlibat dalam bidang

perdagangan internasional seperti *World Trade Organization* (WTO) merupakan pilihan rasional yang kerap dilakukan pemerintahan untuk mengembangkan perekonomian Nasional. Bergabung-nya suatu negara dengan organisasi perdagangan internasional secara otomatis memaksa negara tersebut untuk mentaati prinsip – prinsip yang berlaku dalam organisasi. Tetapi bagi sebagian negara prinsip – prinsip yang diberlakukan organisasi perdagangan dapat pula membatasi perkembangan perdagangan negara tersebut. Adanya prinsip-prinsip ini terkadang mendorong suatu negara untuk melakukan pembentukan FTA yang lebih menguntungkan dengan maksud menghilangkan batasan-batasan perdagangan antar negara. Sehingga negara dapat me-minimalisir biaya produksi dan meningkatkan tingkat produksi dengan harga yang lebih terjangkau tetapi dengan kualitas yang tinggi.

Implementasi konsep perdagangan bebas belakangan ini menjadi opsi sistem perdagangan yang diterapkan oleh negara sebagai strategi untuk meningkatkan perekonomian negara, baik kerjasama perdagangan secara bilateral maupun multilateral. Salah satu alasan utama negara memilih menggunakan sistem perdagangan bebas adalah negara percaya melalui perdagangan bebas akan tercipta pembaharuan pasar bebas dalam globalisasi ekonomi dimana hal ini akan membawa kesejahteraan bagi semua.

B. Perspektif dan Motif Perdagangan Bebas Jepang

Pada periode 1990-an kebijakan perdagangan internasional Jepang berfokus terhadap manajemen hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat, atau hanya berpusat pada sistem yang diterapkan oleh *World Trade Organization* (WTO) untuk mengatur hubungan-nya dengan negara – negara lain (Pekkanen, 2005). Strategi ini mulai mendapat protes serta kritik dari pengamat ekonomi serta perwakilan resmi pemerintahan, hal ini dikarenakan prinsip – prinsip yang diberlakukan dibawah sistem WTO yang dinilai sering kali membatasi pergerakan Jepang dalam upaya perkembangan ekonomi. Selain itu, kurangnya hasil dari pertemuan yang diadakan oleh WTO serta perundingan yang kerap berujung pada kebuntuan menjadi alasan yang mendorong munculnya kritik ini. Sebagai dampak dari peristiwa ini terjadi perubahan paradigma dalam arah kebijakan ekonomi internasional Jepang, dari yang sebelumnya menganut sistem multilateral menjadi sistem bilateral. Perubahan paradigma ini membuat pemerintah Jepang lebih aktif dalam forum internasional dan selektif dalam menentukan negara untuk bekerja sama. Pada tahun 1998, konsep *Free Trade Agreement* (FTA) mulai diberlakukan sebagai instrumen utama untuk kebijakan ekonomi asing Jepang.

Di tahun yang sama, Meksiko dan Korea Selatan melihat Jepang sebagai negara yang memiliki kemungkinan untuk menjadi rekan pembentukan FTA. Hal ini pula yang dinilai turut memacu Jepang melakukan pergeseran paradigma dalam pembentukan kerjasama. Dalam kasus pembentukan kerjasama dengan Meksiko, sebagian besar perusahaan Jepang melihat diri mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan jika dibandingkan dengan pesaing – pesaing dari Amerika

Serikat, dikarenakan adanya dampak dari implementasi regulasi NAFTA. *Nippon Kaidanren* sebagai organisasi bisnis yang memiliki pengaruh terhadap arah perekonomian di Jepang mendukung pembentukan FTA antara Jepang dengan Meksiko, hal ini dinilai sebagai salah satu jalan untuk menangani diskriminasi yang mereka hadapi. Bersama dengan Kementerian ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang dan *Japanese External Trade Organization* (JETRO), mereka membentuk *FTA Vanguard* yang merumuskan dan mendorong kebijakan FTA menjadi instrumen baru.

Dalam kasus hubungan Jepang dengan Korea saat itu, wacana pembentukan FTA merupakan salah satu langkah untuk mengawali perbaikan dan penguatan hubungan politik antara kedua negara. Perundingan dalam tingkat pemerintahan antar kedua negara pertama kali didasari oleh motif politik, dimana proses ini dimulai pada tahun 2000 hingga kedepannya, *FTA Vanguard* dengan kementerian keuangan Jepang (*Ministry of Finance/MOF*) dan Kementerian Luar Negeri Jepang (*Ministry of Foreign Affairs/MOFA*) bekerja sama dan membentuk *FTA Coalition* untuk meninjau dan menindak lanjuti hal ini. Terlebih lagi bagi MOFA, hal ini merupakan perubahan fundamental diajukan oleh mereka, dimana MOFA memang sangat menganjurkan perubahan paradigma multilateral dalam kebijakan perdagangan (Chiavacci, 2008).

Tetapi pada akhirnya pembentukan FTA pertama kali terbentuk antara Jepang dengan Singapura. Hal ini diawali saat Jepang mencoba untuk memprakarsai kerjasama antara Jepang dengan ASEAN. Sebagai reaksinya Perdana Menteri Singapura yang menjabat pada masa itu, Goh Chok Tong

mengusulkan pembentukan FTA kepada Perdana Menteri Jepang Obuchi pada Desember 1999. Mereka memutuskan untuk membentuk kelompok studi yang terdiri dari perwakilan resmi pemerintahan, pengusaha serta para akademisi untuk melakukan penelitian terhadap rumusan FTA serta dampak yang mungkin terjadi terhadap perekonomian kedua negara. Setelah melakukan serangkaian penelitian dan studi terhadap kemungkinan dan dampak yang mungkin terjadi, kelompok studi tersebut mengusulkan kepada kedua perdana menteri untuk melakukan perundingan pembentukan FTA antara kedua negara pada Oktober 2000. Sebagai respon atas rekomendasi yang diberikan oleh kedua kelompok studi tersebut, Kedua perdana menteri baik Jepang maupun Singapura meminta perwakilan resmi dari pemerintah untuk memulai negosiasi FTA. Negosiasi tersebut dimulai pada Januari 2001 dan mencapai keputusan bersama pada Oktober 2001. Perjanjian tersebut kemudian ditanda tangani pada Januari 2002 dan mulai berlaku pada November 2002. Negosiasi antara kedua negara berjalan cukup halus karena kesamaan pemahaman dalam pembatasan perdagangan dari sektor agrikultur yang dipegang kedua negara (urata, 2005)

Keputusan Jepang untuk membentuk FTA dengan Singapura didasari penilaian bahwa Singapura mungkin merupakan pilihan terbaik sebagai rekan kerjasama untuk menunjukkan bahwa isu agrikultur dapat dihilangkan dari FTA, serta memberi sinyal kepada negara lain bahwa Jepang telah mempersiapkan komitmen untuk membangun kerjasama dengan negara – negara tetangga. Jepang percaya bahwa FTA telah menjadi salah satu opsi terbaik dalam kebijakan

perdagangan. Sehingga pembentukan FTA, terutama dengan negara – negara tetangga menjadi sebuah keputusan yang signifikan.

Saat ini, Jepang telah membentuk perjanjian Kemitraan Ekonomi (*Economic Partnership Agreements / EPA*) dengan sebelas negara yang juga meliputi unsur – unsur FTA serta mencakup sektor – sektor pembangunan institusi seperti investasi, kompetisi, hak kekayaan intelektual dan pengembangan sumber daya manusia . Jepang juga sedang menjalin negosiasi untuk membentuk EPA dengan beberapa negara lainnya. Jepang meyakini bahwa perjanjian ini akan menjadi batu loncatan untuk mencapai tingkat liberalisasi perdagangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kerjasama multilateral.

Disaat yang sama, Jepang aktif berpartisipasi dan memberi kontribusi dalam berbagai studi tentang kemungkinan pembentukan kerangka kerjasama kemitraan ekonomi di regional Asia Timur dan Asia Pasifik, seperti *Comprehensive Economic Partnership in East Asia* (CEPEA), Perjanjian Perdagangan Bebas Asia Timur (*East Asia Free Trade Agreement / EAFTA*) dan *Free Trade Area of Asia – Pasific* (FTAAP). Studi ini dilakukan dengan cara mempertimbangkan pengaruh mereka dalam sistem WTO dan ekonomi dunia, serta melalui studi terhadap kebijakan yang diterapkan negara – negara tersebut dalam lingkup regional tersebut (Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, 2013)

Dalam “*Diplomacy Bluebook*” pemerintah Jepang melakukan penguatan diplomasi ekonomi yang akan berkontribusi terhadap proses revitalisasi ekonomi Jepang. Secara khusus untuk berkontribusi dalam realisasi strategi pertumbuhan yang dilakukan pemerintah. Diplomasi ekonomi dengan negara-negara

berkembang, termasuk negara yang berkembang dengan cepat menjadi hal yang penting. Hal ini dilakukan melalui negosiasi pembentukan FTA / EPA dengan negara – negara lain

Strategi untuk meningkatkan kemitraan ekonomi tingkat tinggi dengan tujuan meningkatkan kesempatan ekspor bagi perusahaan Jepang dan menciptakan lingkungan yang dapat mempermudah mereka melakukan investasi asing menjadi faktor yang penting. Pada tahun 2013, negosiasi pembentukan perjanjian kemitraan ekonomi Jepang mencapai skala baru. Hal ini mencakup perjanjian *Trans Pasific – Partnership (TPP)*, *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*, *Free Trade Agreement (FTA)* antara Jepang, China dan Korea, serta Jepang – Uni Eropa *Economic Partnership Agreement* .

Selain itu, pasca gempa yang terjadi pada Maret 2011. Rasio ketergantungan Jepang terhadap penggunaan bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik meningkat. Hal ini melatar belakangi Jepang untuk menjalin diplomasi ekonomi untuk melakukan perdagangan dengan negara yang memiliki cadangan bahan bakar fosil yang melimpah untuk menjamin pasokan yang stabil dengan harga rasional. Hal ini menjadi isu penting karena pasokan energi merupakan faktor penting bagi proses produksi yang dilakukan industri industri Jepang, dimana sektor ini mempengaruhi angka ekspor Jepang bagi negara luar (Japan's Ministry of Foreign Affair, 2013)

Pemberlakuan konsep FTA serta perubahan perspektif dalam kebijakan perdagangan Jepang dipengaruhi oleh beberapa Faktor. Pertama, pembentukan FTA akan memberikan akses lebih terhadap pasar. Jepang merupakan salah satu

negara yang tidak memiliki *Regional Trade Arrangement*, sedangkan tingkat kerjasama suatu negara melalui pembentukan FTA meningkat secara drastis. Jepang yang dihadapkan pada pasar global dengan tingginya tingkat tindakan diskriminatif sebagai akibat *Trading Arrangement* didunia, merasa untuk mengamankan pasar bagi perusahaan – perusahaan Jepang melalui pembentukan FTA. Sebagaimana dasarnya FTA dibentuk untuk menghapuskan batasan – batasan perdagangan dengan negara rekan, maka perusahaan – perusahaan Jepang dapat menikmati peluang yang lebih besar. Pemikiran seperti ini turut membawa pandangan positif bagi konsep FTA, terutama saat negosiasi dibawah WTO hanya menghasilkan sedikit progres. Untuk meningkatkan daya saing perusahaan Jepang pada tingkat internasional, maka sangatlah penting untuk membuka lebih banyak peluang disaat bersaing dengan perusahaan asing. Sebagai contoh, Pembentukan FTA dengan negara – negara di Asia Timur mencakup Korea, Thailand, Malaysia dan Filipina dipastikan akan menambah angka ekspor Jepang kepada negara – negara tersebut, dimana saat ini negara – negara tersebut dilindungi oleh penerapan *tariff* yang tinggi serta proteksi dalam bentuk *non-tariff*, selain itu melalui pembentukan FTA perusahaan Jepang mampu melakukan ekspansi bisnis di negara yang terlibat FTA melalui Investasi Asing langsung (*Foreign Direct Investment/ FDI*) jika FTA yang dibentuk tidak hanya mengatur perdagangan tetapi juga memuat perjanjian liberalisasi investasi.

Perluasan pasar merupakan motif yang sangat jelas bagi Jepang untuk meng-kerucutkan pembentukan FTA dengan Meksiko. Adanya NAFTA dan Perjanjian FTA antara Uni Eropa dengan Meksiko mengizinkan perusahaan –

perusahaan Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk melakukan ekspor terhadap produk mereka ke Meksiko tanpa adanya hambatan *tariff*, sedangkan bagi Jepang yang belum mencapai hasil akhir negosiasi dengan Meksiko, untuk melakukan ekspor produk, perusahaan Jepang diharuskan membayar *tariff* ekspor yang tinggi. Hal ini karena adanya proteksi dalam bentuk *tariff* yang tinggi di pasar Meksiko. Nilai rata – rata *tariff* untuk meng-ekspor ke Meksiko pada tahun 2001 tercatat mencapai angka 16,2 persen. Diantara sektor industri Jepang, Industri otomotif dan industri baja yang paling mendesak pemerintah untuk membentuk FTA dengan Meksiko. Sektor otomotif tertarik untuk memperluas ekspor mobil siap pakai ke Meksiko, sedangkan industri baja tertarik untuk meng-ekspor produk baja yang biasa digunakan dalam kegiatan produksi elektronik, peralatan rumah tangga, mesin serta otomotif bagi perusahaan perakitan Jepang yang beroperasi di Mexico.

Motif berikutnya bagi Jepang untuk menjadikan FTA instrumen utama kebijakan ekonomi asing adalah untuk menstimulasi pembaruan struktural yang dinilai penting dalam proses revitalisasi stagnansi perekonomian yang dihadapi Jepang saat ini. Sejak meledaknya gelembung ekonomi di awal periode 1990-an, Perekonomian Jepang mengalami resesi berkepanjangan. Faktanya periode 1990-an dianggap sebagai “*lost decade*” bagi Jepang. Meskipun sistem yang diterapkan sejak masa berakhirnya perang memiliki kontribusi tinggi terhadap tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi Jepang, namun belakangan ini sistem tersebut tidak lagi dianggap efektif. Inilah salah satu alasan mengapa Jepang gagal memulihkan perekonomiannya pasca kemunduran panjang yang dialaminya. Banyak pengamat yang setuju, bahwa pembaruan struktural diperlukan untuk menggantikan sistem

lama yang tidak lagi efektif. Dalam sektor – sektor spesifik yang terpaut dalam proses negosiasi pembentukan FTA, maka perlu dilakukan identifikasi dan peninjauan ulang untuk mengetahui apakah perlu dilakukan pembaruan struktur dalam sektor tersebut. Sebagai contoh sektor agrikultur dan perikanan serta sektor jasa seperti sektor medis dan pendidikan. Sektor medis dan pendidikan yang terkait dalam proses negosiasi FTA menyangkut tentang lisensi profesional serta mobilitas ahli dalam bidang tersebut. Saat ini pembahasan dalam sektor medis dan pendidikan dititik beratkan terhadap pengeluaran Visa, dimana pengeluaran visa hanya menjamin orang yang telah terqualifikasi.

Terakhir, Jepang ber-ekspetasi untuk melakukan penguatan sistem perdagangan melampaui sistem yang diterapkan oleh WTO. Terdapat argumen yang menyatakan bahwa FTA akan membawa dampak negatif dalam sistem perdagangan dunia karena adanya diskriminasi. Sebagian lagi ber-argumen bahwa dampak negatif ini dapat diredam dengan dampak positif yang diperoleh melalui penerapan konsep FTA. FTA Mungkin membawa dampak positif melalui pembinaan yang dilakukan WTO, jika FTA fokus terhadap pembahasan isu yang tidak ada dalam cakupan kerangka sistem WTO. Jepang mungkin berhasil melakukan penyempurnaan sistem WTO dalam bentuk *Economic Partnership Agreement* (EPA) dengan aransemen yang berada diluar cakupan WTO. Sebagai contoh WTO tidak memiliki regulasi khusus bagi persaingan serta kebijakan investasi. Jepang telah mencoba untuk meng-ikutsertakan fitur baru ini dalam EPA termasuk perjanjian yang masih dalam tahap negosiasi.

Pembentukan FTA ataupun EPA telah menjadi kebijakan yang signifikan bagi Jepang. Melalui pembentukan FTA ataupun EPA, Jepang percaya kebijakan ini dapat membawa Jepang kembali pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seperti apa yang telah Jepang raih sebelum terjadinya stagnansi pertumbuhan ekonomi dan gelembung ekonomi di Jepang. Kebijakan baru seperti pembentukan FTA menjadi terobosan penting bagi proses revitalisasi dan perubahan struktural bagi Jepang. Pembentukan FTA juga diperhitungkan Jepang sebagai langkah untuk menghapuskan diskriminasi – diskriminasi yang ada dalam pasar global.



Table 2. Free Trade Agreement of Japan

Countries	Status
Australia	Bilateral (Under Negotiation)
Brunei	Bilateral (in force since 2008); AJCEP* (in force since 2009)
Cambodia	AJCEP* (in force since 2009)
Canada	Bilateral (Planned**)
Chile	Bilateral (In force since 2007)
China	Bilateral (Planned**)
European Union	Bilateral (Planned**)
GCC	Bilateral (Planned**)
India	Bilateral (In force since 2011)
Indonesia	Bilateral (In force since 2008)
Korea	Bilateral (Under Negotiation)
Lao PDR	AJCEP* (In force since 2008)
Malaysia	Bilateral (in force since 2006); AJCEP* (in force since 2009)
Mexico	Bilateral (in force since 2005)
Mongolia	Bilateral (Planned**)
Myanmar	AJCEP* (In force since 2008)
New Zealand	Bilateral (Planned**)
Peru	Bilateral (Signed)
Phillipines	Bilateral (in force since 2008); AJCEP* (in force since 2010)
Singapore	Bilateral (in force since 2002); AJCEP* (in force since 2008)
Switzerland	Bilateral (In force since 2009)
Taiwan	Bilateral (Signed)
Thailand	Bilateral (in force since 2007); AJCEP* (in force since 2009)
Vietnam	AJCEP* (in force since 2008); bilateral (in force since 2009)

Notes :

(*) Berlaku-nya *Asean – Japan Comprehension Economic Partnership* (AJCEP). Perjanjian berlaku sesuai proses ratifikasi masing masing

(**) Dalam tahap konsultasi, studi peluang, dan negosiasi persiapan

Source: OECD (<http://stats.oecd.org/Index.aspx>; accessed September 15, 2011), Japanese Ministry of Foreign Affairs (www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/index.html; accessed September 15, 2011).

C. Perspektif dan Motif Perdagangan Bebas Swiss

Kesejahteraan ekonomi Swiss sangatlah bergantung terhadap perdagangan luar negeri dan investasi, hal ini dikarenakan keadaan pasar domestik yang relatif kecil dan keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki oleh Swiss. Adapun objektif utama dari kebijakan ekonomi asing Swiss adalah memastikan para penyelenggara ekonomi-nya dapat menikmati keterbukaan akses pasar dan prediksi atas kondisi akses pasar di seluruh dunia. Kebijakan perdagangan Swiss yang mengenai akses pasar dilandasi oleh tiga pilar utama : Keanggotaannya dalam *World Trade Organization* (WTO), perjanjian bilateral yang dibentuk dengan Uni Eropa, dan pembentukan perjanjian preferensi dagang dengan negara - negara diluar kawasan Eropa.

Kepentingan perdagangan luar negeri dan ekonomi kecil dan ekonomi menengah Swiss dijalankan melalui sistem liberalisasi multilateral, penggunaan sistem liberal dibawah kerangka *World Trade Organization* (WTO) menjadi instrumen terbaik bagi pelaksanaan dua sektor ekonomi tersebut. Sedangkan pembentukan perjanjian preferensi dagang dengan negara – negara tertentu yang telah diseleksi sebelumnya untuk dijadikan rekan kerjasama menjadi opsi penting sebagai instrumen tambahan perekonomian Swiss untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing-nya di pasar global. Secara khusus dapat dikatakan bahwa para aktor perekonomian Swiss akan mengalami kerugian kompetitif jika negara – negara lain telah membentuk perjanjian preferensi dagang sementara Swiss tidak / belum membentuk perjanjian preferensi dagang dengan negara tersebut.

Sejak periode 1990-an, jumlah perjanjian preferensi dagang (dapat diartikan sebagai *Free Trade Agreement / FTA*) regional maupun *trans* regional meningkat secara signifikan. Berbeda dengan fenomena lainnya, hal ini bukanlah sekedar fenomena yang sedang menjadi tren sesaat, dan euforia-nya akan berkurang seiring berjalannya waktu. Fenomena pembentukan FTA antara negara – negara di dunia telah menjadi terobosan besar dalam kebijakan ekonomi yang berkembang di sebagian besar negara. Dalam konteks ini, Uni Eropa dapat dikatakan sebagai salah satu contoh studi kasus. Sebelumnya Uni Eropa hanya berfokus pada wilayah Eropa Timur dan negara-negara mediteranian, saat ini Eropa telah memperluas jaringan kerjasamanya dengan negara – negara diluar Eropa dan kawasan Mediterania, sebut saja Meksiko, Chili dan Afrika Selatan. Kasus lainnya adalah Amerika Serikat, dalam upaya liberalisasi perdagangan, Amerika Serikat mulai meningkatkan penggunaan kerangka *Free Trade Agreement*. Perjanjian yang dibentuk antara lain dengan Meksiko dan Kanada (Pembentukan *North America Free Trade Area/NAFTA*), Israel, Maroko, Chili, Australia dan Singapura. Selain itu Amerika juga tengah melakukan negosiasi pembentukan kerjasama perdagangan dengan Korea dan Malaysia. Dan terakhir adalah Jepang yang saat ini meningkatkan pembentukan FTA dengan negara – negara rekannya, terutama di wilayah Asia Tenggara.

Didasari dengan latar belakang perkembangan kebijakan perdagangan tersebut, *Free Trade Agreements* menjadi kunci untuk menjaga stabilitas hubungan perekonomian asing Swiss. Pembentukan FTA dengan negara – negara lain menjadi hal vital untuk menjaga posisi Swiss dalam persaingan pasar global. Selain

itu, tidak diragukan lagi pertimbangan yang sama telah dilakukan oleh negara – negara anggota *European Free Trade Area* (EFTA). Dalam 15 tahun terakhir, negara – negara EFTA telah membentuk sejumlah pembentukan FTA dengan negara negara Eropa, wilayah Mediterania dan negara – negara lintas benua lainnya. Pada awal periode 1990-an, EFTA mulai mengembangkan kebijakan FTA dengan negara – negara Eropa, terutama negara yang tengah mengalami transisi ekonomi di wilayah pusat dan Timur Eropa. Pada pertengahan 1990-an EFTA memperluas jaringan kerjasama pembentukan FTA dengan negara – negara mediterania. Pembentukan kerjasama melalui kerangka FTA yang dilakukan EFTA dengan negara Mediterania dibentuk melalui “*Barcelona Process*”. Selanjutnya, sejak tahun 2000, EFTA telah memperluas jaringan kerjasamanya dengan negara – negara diluar wilayah Eropa dan Mediterania seperti Meksiko, Chili, Singapura dan Korea.

Tujuan utama dari pembentukan FTA yang dilakukan oleh EFTA adalah untuk meningkatkan akses pasar dan menjaga posisi negara – negara EFTA dalam pasar global. FTA yang dibentuk oleh EFTA diharapkan mampu mengurangi bentuk diskriminasi yang ada maupun potensi diskriminasi yang mungkin muncul melalui pembentukan perjanjian preferensi dagang yang dibentuk oleh negara – negara lain. Perjanjian yang dibentuk oleh EFTA tidak hanya membahas tentang perdagangan dalam bentuk barang tetapi juga menyangkut Jasa, fasilitasi pembentukan perjanjian, perlindungan dalam sektor investasi dan Hak Kekayaan Intelektual. Sistem inilah yang kemudian diadaptasi oleh Swiss dalam kebijakan ekonomi asing-nya.

Pembentukan FTA yang dibentuk Swiss melalui kerangka EFTA (Bersama Norwegia, Swedia, dan Liechtenstein memberi dampak positif bagi Swiss. Melalui kerangka kerjasama ini Swiss mendapat kekuatan lebih dalam proses negosiasi serta lebih banyak sumber yang diperoleh Swiss. Disatu sisi, kekurangan dari pendekatan yang dilakukan melalui kerangka EFTA adalah adanya ketimpangan prioritas antara negara - negara anggota terpaut dengan struktur ekonomi. Meskipun begitu, Swiss tetap dapat melakukan negosiasi FTA diluar kerangka EFTA (Deiss, 2006).

Sama hal-nya dengan EFTA, motif Swiss melakukan negosiasi pembentukan FTA bilateral mencakup keinginan-nya untuk mencapai stabilitas akses pasar dan bersaing dengan kompetitor asing secara adil serta menciptakan liberalisasi perdagangan yang mampu melampaui sistem WTO. Selain itu, FTA dianggap sebagai solusi alternatif terbaik ditengah ketidak pastian mengenai kesimpulan WTO dalam putaran Doha. Terlebih lagi, mereka bertujuan untuk mempromosikan reformasi domestik yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan posisi Swiss sebagai lokasi usaha. Rekan pembentukan FTA dipilih secara spesifik melalui pertimbangan berdasarkan beberapa kriteria. Dalam hal ini menyangkut, kepentingan ekonomi, adanya diskriminasi maupun potensi diskriminasi dalam persaingan dengan kompetitor Swiss sebagai hasil pembentukan FTA, serta pertimbangan yang didasari tujuan dari kebijakan ekonomi Swiss (Schaub, 2012). Berikut inilah negara – negara yang telah menjalin perjanjian FTA dengan Swiss

Table 3. Free Trade Agreement Swiss dalam lingkup Eropa

Country / Region	Status / comments
EFTA-Convention ²	Entry into force: 3 May 1960
European Community (EC) ³	Entry into force: 1 January 1973; bilateral CH-EC
Faeroe Islands	Entry into force: 1 March 1995; bilateral CH-Faeroe
Macedonia	Entry into force: 1 May 2002
Albania	Entry into force: 1 November 2010
Serbia	Entry into force: 1 October 2010
Ukraine	Entry into force: 1 June 2012
Montenegro	Entry into force: 1 September 2012
Bosnia-Herzegovina	Entry into force: 1 January 2015
Georgia	Signed on 27 June 2016
Customs union Russia -Belarus-Kazakhstan	In negotiations

Source : <https://www.seco.admin.ch> (2015)

Table 4. Free Trade Agreement Swiss dengan kawasan Mediterania

Mediterranean basin	Status and Comments
Turkey	Entry into force: 1 April 1992
Israel	Entry into force: 1 July 1993
Palestinian Authority	Entry into force: 1 July 1999
Morocco	Entry into force: 1 December 1999
Jordan	Entry into force: 1 September 2002
Tunisia	Application since 1 June 2005 ; Entry into force: 1 June 2006
Lebanon	Entry into force: 1 January 2007
Egypt	Application since 1 August 2007. Entry into force: 1 September 2008

Source : <https://www.seco.admin.ch> (2015)

Table 5. Free Trade Agreement Swiss diluar Eropa dan Mediterania

Worldwide	Status and Comments
Mexico	Entry into force: 1 July 2001
Singapore	Entry into force: 1 January 2003
Chile	Entry into force: 1 December 2004
Republic of Korea	Entry into force: 1 September 2006
SACU ⁴	Entry into force: 1 May 2008
Canada	Entry into force: 1 July 2009
Japan	Entry into force: 1 September 2009. Bilateral CH-Japan
Colombia	Entry into force: 1 July 2011
Peru	Entry into force: 1 July 2011
Hong Kong	Entry into force: 1 October 2012
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (GCC) ⁵	Entry into force: 1 July 2014
China	Entry into force: 1 July 2014, bilateral Switzerland - China
Central American States ⁶	Entry into force: 29 August 2014 (Panama and Costa Rica)
Thailand	In negotiations
Indonesia	In negotiations
India	In negotiations
Vietnam	In negotiations
Malaysia	In negotiations
Philippines	Signed on 28 April 2016
Ecuador	In negotiations
The EFTA States have signed Declarations on cooperation with the following partners: the MERCOSUR States (Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay), Mongolia, Mauritius, Pakistan and Myanmar.	

Source : <https://www.seco.admin.ch> (2015)

D. Proses pembentukan Japan – Switzerland Free Trade and Economic

Partnership Agreement (JSFTEPA)

Sejak awal periode 1990-an, Swiss telah membangun hubungan FTA dengan sejumlah negara diluar Uni Eropa. Peningkatan konstan terhadap akses pasar mewakili objektif utama dari kebijakan ekonomi asing Swiss. Melalui pembentukan FTA, Swiss bertujuan untuk memfasilitasi perusahaan – perusahaan domestiknya untuk mendapatkan tingkat akses ke pasar global setidaknya setara dengan tingkat akses yang dimiliki perusahaan – perusahaan pesaing asing lainnya. *Free Trade Agreements* menjadi instrumen penting untuk menjaga dan memperkuat daya saing Swiss sebagai lokasi bisnis. Konsultasi ekonomi bilateral antara Swiss dan Jepang telah dimulai sejak tahun 1995. Saat Jepang memperkenalkan perjanjian preferensi dagang yang dikenal dengan nama *Economic Partnership Agreements* (EPA) sebagai instrumen kebijakan perdagangan, Swiss merespon hal tersebut dengan mengusulkan studi terhadap peluang negosiasi perjanjian preferensi dagang bilateral antara kedua negara.

Usulan ini sejalan dengan kebijakan perdagangan Swiss, dimana sejak awal periode 1990-an Swiss telah meng-implementasikan dan membentuk *Free Trade Agreements* (FTAs) dengan kerangka utama EFTA. Di akhir periode 1990-an negara – negara EFTA mulai memperluas lingkup perjanjian kerjasama FTA mereka yang awalnya hanya meliputi perdagangan barang dan Hak Kekayaan Intelektual, lingkup perjanjian tersebut diperluas dan turut mencakup perdagangan

jasa, investasi dan pengadaan sektor publik. Saat ini, lingkup EFTA/FTA milik Swiss serupa dengan EPA yang dimiliki Jepang.

Eksplorasi awal terhadap peluang – peluang serta kesamaan atas perjanjian preferensi dagang mengungkapkan bahwa pendekatan melalui kerangka kerjasama EFTA tidak mungkin diberlakukan, hal ini dikarenakan perbedaan struktur perdagangan antara Jepang dengan negara – negara anggota EFTA lainnya seperti Norwegia, Swedia dan Liechtenstein. Berdasarkan hal tersebut, pembentukan kerjasama bilateral menjadi satu-satunya opsi realistis untuk membentuk perjanjian kerjasama antara kedua negara baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Di tahun 2003- 2004, studi kelayakan terpisah pada FTA bilateral / EPA dilakukan di Swiss oleh *State Secretariat for Economic Affairs* (SECO) dan bagi pihak Jepang dilakukan oleh *Japanese External Trade Organization* (JETRO). Hasil studi mengungkapkan bahwa pembentukan *Free Trade and Economic Partnership Agreement* (FTEPA) antara Jepang dan Swiss akan menstimulasi penguatan hubungan kedua negara dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Kemudian, dalam kesempatan kunjungan yang dilakukan Presiden Konfederasi Swiss, Joseph Deiss kepada Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi di Tokyo pada Oktober 2004, Deiss mengusulkan kedua negara untuk mengambil langkah lebih lanjut untuk membentuk FTA / EPA antara Jepang dan Swiss. Pertemuan selanjutnya yang dilakukan pada April 2005 mempertemukan Perdana Menteri Koizumi dengan Presiden Swiss Samuel Schmid di Tokyo.

Pertemuan ini membahas dan menyetujui rencana untuk melakukan studi kelayakan yang dilakukan oleh pihak otoritas dari kedua negara.

Hal ini menuntun pembentukan *Joint Governmental Study Group*, yaitu kelompok studi yang beranggotakan para akademisi serta perwakilan resmi kedua negara yang dinilai kompeten dalam analisa peluang kerjasama ekonomi. Dimana kemudian kelompok ini melakukan pertemuan sebanyak lima kali dalam kurun waktu antara Oktober 2005 sampai Desember 2006. Kelompok studi ini berfokus kepada setiap sektor komprehensif yang tercakup dalam FTEPA, yang kemudian melakukan penilaian melalui relasi kerangka FTEPA tersebut terhadap pendekatan masing – masing negara, selain itu tujuan studi ini untuk membuat gambaran - gambaran yang komprehensif dari hubungan ekonomi antara Jepang dan Swiss, serta kemungkinan kerjasama antara kedua negara di sektor lain seperti dalam sektor ilmu pengetahuan, teknologi, turisme, keamanan sosial, memerangi tindak kriminal *money laundry* serta bantuan hukum dalam permasalahan kriminal yang juga turut dibahas melalui kerangka studi yang ditelaah dirancang oleh kelompok studi tersebut.

Hasil laporan dari studi utama yang dilakukan *Joint Governmental Study Group* dengan maksud memper-erat hubungan ekonomi Jepang dan Swiss akhirnya dipublikasikan pada Januari 2007, laporan ini mengungkapkan bahwa pembentukan FTEPA tersebut akan memperkuat hubungan ekonomi yang telah dibentuk sebelumnya., terutama dalam sektor perdagangan barang, jasa dan investasi, serta menguatkan daya saing kedua negara di pasar global. Laporan ini kemudian merekomendasikan agar kedua negara segera memulai proses negosiasi

pembentukan kerjasama secepatnya. Rekomendasi ini turut mendapat dukungan dari pihak swasta kedua negara, seperti *economiesuisse* dari Swiss dan *Nippon Keidanren* dari Jepang

Pada 19 Januari 2007, pembicaraan resmi melalui telfon yang dilakukan presiden konfederasi Swiss, Micheline Calmy-Rey dan Perdana menteri Jepang, Shinzo Abe mencatat hasil yang diberikan oleh kelompok studi kedua negara, kemudian bersama – sama kedua negara mengumumkan bahwa negosiasi bilateral antara Jepang dan Swiss akan dijalankan. Kedua negara juga telah menyetujui bahwa negosiasi tersebut akan dilakukan di Jepang dan Swiss secara bergantian, dimana negosiasi putaran pertama akan diadakan di Tokyo, Jepang pada Mei 2007.

Negosiasi yang dilakukan sebanyak delapan kali antara Jepang dan Swiss dilakukan dibawah komando Jun Yokota, duta besar *International Commercial and Economic Affairs* di Kementerian Luar Negeri Jepang, dan duta besar Luzius Wasescha, perwakilan tetap Swiss untuk organisasi ekonomi internasional di Jenewa dan Delegasi dari *Federal Council for Trade Agreements*. Pada 19 Februari 2009, Ketua dari Departemen Hubungan Ekonomi Federasi Swiss, Doris Leuthar dan Menteri Luar negeri Jepang, Hirofumi Nakasone menanda tangani *Japan – Switzerland Free Trade and Economic Partnership Agreement* (JSFTEPA) di Tokyo, yang kemudian mulai di-implementasikan pada 1 September 2009.

Gambar 3. Alur negosiasi pembentukan JSFTEPA

2007	January	President of the Swiss Confederation Calmy-Rey and Prime Minister Abe decide officially to launch negotiations
	March	Preparatory meeting in Tokyo
	May	1st round of negotiations in Tokyo
	July	2nd round of negotiations in Savognin/CH
	October	3rd round of negotiations in Yokohama
	November	4th round of negotiations in Thun/CH
2008	February	5th round of negotiations in Tokyo
	May	6th round of negotiations in Lugano-Cadro/CH
	June	7th round of negotiations in Tokyo
	September	8th round of negotiations in Bern, agreement in principle; initialling of the agreement early morning on 25 September by the respective chief negotiators
2008-2009	October - January	Finalisation of the last issues, legal revision of the texts
	February	Signature by Federal Councillor Leuthard and Foreign Minister Nakasone at the Ministry of Foreign Affairs in Tokyo
	Summer	Completion of the ratification processes in Switzerland and Japan
	September 1	Entry into force of the JSFTEPA

Source : Swiss-Japan.co.jp

